

Dukung Asta Cita Presiden, Dinkes Baubau Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kantor Imigrasi



Laporan: Ardi, Baubau Post-Durasi Times

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) terus memperkuat upaya deteksi dini penyakit di masyarakat. Bertempat di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau pada Rabu (21/01/2026), dilaksanakan skrining kesehatan menyeluruh guna mendeteksi Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan Penyakit Menular (PM).

Kegiatan ini merupakan langkah konkret dalam mendukung Asta Cita serta Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam

Lanjut ke Hal: 7

Tingkatkan Profesionalisme Penyidik, Bidkum Polda Sultra Gelar Tes Uji Objektif KUHP dan KUHP di Polres Baubau

Laporan: Amat Jr

BAUBAU, BP-Dalam rangka memperkuat kompetensi personel di bidang penegakan hukum, Bidang Hukum (Bidkum) Polda Sulawesi Tenggara menggelar kegiatan Tes Uji Objektif mengenai pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) di Aula Kemitraan Polres Baubau, Rabu (21/01/2026).

Lanjut ke Hal: 7



Pemkab Buton Tengah Panen Raya Sayuran di Benteng Liuwawono Mawasangka



Laporan: Komaruddin

BUTENG BP-Pemkab Buton Tengah bersama Tim Penggerak PKK melaksanakan panen raya sayuran di kawasan Benteng Liuwawono, Kecamatan Mawasangka, Jumat (9/1/2026). Kegiat-

tan ini merupakan bagian dari program ketahanan pangan masyarakat yang didukung oleh PKK dan Dinas Pertanian serta Tanaman Pangan.

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP, M.Si, mengatakan kawasan

Benteng Liuwawono memiliki potensi lahan yang cukup luas dan saat ini mulai dimanfaatkan secara produktif oleh masyarakat.

â€œAlhamdulillah,

Lanjut ke Hal: 7

Gubernur Sultra ASR: Persiapan Umat Masa Depan Harus Visioner dan Adaptif

Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, menegaskan pentingnya menyiapkan umat yang berkualitas, adaptif, dan relevan dengan perkembangan zaman di tengah tantangan era disrupsi yang semakin kompleks.

Hal tersebut disampaikan Gubernur saat memberikan sambutan dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2026



Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka

yang digelar di Tamimu Ballroom Nirwana Buton Villa, Kota Baubau, Kamis (8/1/2026).

Menurut Gubernur, pembangunan umat ke depan harus disertai peren-

canaan yang visioner dan responsif terhadap perubahan sosial, budaya, dan teknologi.

“Kita perlu menyusun pembangunan keagamaan yang visioner, adaptif, dan berkualitas, dengan berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, inovasi, kreativitas, dan pemahaman agama yang relevan bagi generasi muda,” ujar Gubernur Andi Sumangerukka.

Gubernur menilai, generasi muda saat ini hidup dalam ruang sosial yang terbuka, den-

Lanjut ke Hal: 7

Polda Sultra Ikuti Launching Direktorat PPA/PPO, Dipimpin Langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo



Laporan: Mashuri

SULTRA, BP-Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) mengikuti kegiatan launching Direktorat Tindak Pidana Perempuan dan Anak serta Tindak Pidana Perdagangan Orang (Direktorat PPA/PPO) yang digelar secara daring melalui zoom meeting di Aula Dachara, Rabu (21/1/2026). Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapol-

ri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dari Mabes Polri.

Zoom meeting tersebut diikuti oleh Kapolda Sultra Irjen Pol Didik Agung Widjanarko, S.I.K., M.H., Irwasda Polda Sultra Kombes Pol Hartoyo, S.I.K., M.H., Dir Reskrimum Kombes Pol Wisnu Wibowo, S.H., S.I.K., M.Si, para pejabat utama (PJU) Polda Sultra, personel Subdit PPA Ditreskrimum Polda Sultra serta perwakilan dari

Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI), Plt Kadis Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Sultra, Asisten I Kota Kendari, perwakilan DP3A Kota Kendari, dan Ka UPTD PPA.

Dir Reskrimum Kombes Wisnu Wibowo mengatakan launching ini menandai penguatan kelembagaan PPA dan PPO yang kini berdiri sebagai

Lanjut ke Hal: 7

Dukung Asta Cita Presiden, Dinkes Baubau Gelar Pemeriksaan Kesehatan Gratis di Kantor Imigrasi

program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) bagi populasi berisiko dan masyarakat umum.

Kadis Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Baubau, Yulina, S.Kes, M.Kes, menjelaskan, dalam aksi kali ini, pihaknya memberikan perhatian khusus pada penyakit Tuberkulosis (TBC). Selain paket

pemeriksaan kesehatan standar, petugas juga melakukan Tes Mantoux atau Tuberculin Skin Test (TST).

“Tes Mantoux ini sangat krusial untuk mendeteksi keberadaan bakteri penyebab Tuberkulosis dalam tubuh, bahkan sebelum gejala aktif muncul (TB Laten). Ini sejalan dengan target Presiden untuk menurunkan kasus TBC hingga 50%,”

ujarnya.

Ditambahkan, tes dilakukan dengan menyuntikkan larutan Purified Protein Derivative (PPD) di bawah permukaan kulit lengan bawah. Petugas akan mengukur reaksi kulit berupa pembengkakan (indurasi) setelah 48-72 jam.

D i u n g k a p k a n , kegiatan yang berlangsung tertib ini dilaksanakan oleh tim

tenaga kesehatan dari UPTD Puskesmas Sulaa. Sasaran pemeriksaan meliputi seluruh pegawai Kantor Imigrasi Kota Baubau serta anggota Dharma Wanita. Melalui deteksi dini ini, diharapkan produktivitas pegawai tetap terjaga dan penyebaran penyakit menular dapat diputus sedini mungkin, demi mewujudkan masyarakat Baubau yang lebih sehat dan tangguh. (*)

Pemkab Buton Tengah Panen Raya Sayuran di Benteng Liuwawono Mawasangka



hari ini kita kembali mengunjungi Benteng Liuwawono. Beberapa bulan lalu kita sudah mendukung program PKK bersama Dinas Pertanian. Di kawasan benteng ini luasnya sekitar lima hektare lebih, terdapat dua benteng, dan saat ini baru satu yang diolah. Masyarakat kita bantu menanam palawija, sayur-sayuran, dan cabai,” ujar Bupati.

Menurutnya, lokasi tersebut sedang dijadikan kawasan percontohan pertanian terpadu berbasis

masyarakat, yang diharapkan dapat mendorong peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi keluarga.

Sementara itu, Ketua TP-PKK Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd, menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan imbauan TP-PKK Provinsi Sulawesi Tenggara terkait ketahanan pangan keluarga melalui pemanfaatan pekarangan.

“Alhamdulillah, hari ini kita panen cabai, terong, dan berbagai jenis sayuran lainnya bersama Bapak Bupati. Ini bentuk

nyata gerakan menanam di pekarangan,” ungkapnya.

Ia mengajak seluruh pengurus dan anggota PKK, khususnya Pokja III, untuk terus mengarahkan masyarakat agar memanfaatkan lahan pekarangan rumah sebagai sumber pangan keluarga.

Panen raya ini diharapkan menjadi motivasi bagi masyarakat Mawasangka dan wilayah lain di Buton Tengah untuk mengembangkan pertanian skala rumah tangga secara berkelanjutan. (*)

Polda Sultra Ikuti Launching Direktorat PPA/PPO, Dipimpin Langsung Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo

direktorat tersendiri di lingkungan Polri, baik di tingkat pusat di bawah Bareskrim Polri, maupun di tingkat daerah melalui Direktorat PPA-PPO dan Sat PPA di Polres.

Saat ini terdapat 11 Polda yang akan memiliki Direktorat PPA/PPO, yakni Polda Sulawesi Selatan, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Timur, Polda Jawa Barat, Polda Sumatera Utara, Polda Sumatera Selatan, Polda Jawa Tengah, Polda Nusa Tenggara Barat, Polda Sulawesi Utara, Polda Kalimantan Barat, dan Polda Nusa Tenggara Timur.

“Pembentukan direktorat ini diharap-

kan mampu meningkatkan fokus, profesionalisme, serta efektivitas penanganan perkara kejahatan terhadap perempuan, anak, dan tindak pidana perdagangan orang, sekaligus memperkuat perlindungan korban dan meningkatkan kepercayaan publik melalui penegakan hukum yang berkeadilan dan humanis,” ungkap Kombes Wisnu Wibowo.

Dijadikannya PPA dan PPO sebagai direktorat tersendiri diharapkan membawa fokus yang lebih kuat dan mendalam dalam penanganan kejahatan terhadap perempuan, anak, serta tindak pidana perda-

ngan orang. Dengan struktur organisasi khusus, penanganan kasus tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi prioritas, sehingga proses penyelidikan, penyidikan, dan pengungkapan perkara dapat berjalan lebih cepat, profesional, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Selain penguatan penegakan hukum, pembentukan direktorat ini juga diharapkan meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan yang lebih humanis, ruang pemeriksaan yang ramah perempuan dan anak, serta koordinasi dengan lembaga terkait seperti layanan sosial dan pendamping psikologis menjadi lebih terstruktur. Hal ini

penting agar korban merasa aman, didengar, dan mendapatkan hak-haknya secara utuh, bukan sekadar menjadi objek perkara hukum.

Pada akhirnya, keberadaan Direktorat PPA dan PPO diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat upaya pencegahan. Dengan data yang lebih akurat, kerja sama lintas instansi yang solid, dan edukasi yang berkelanjutan kepada masyarakat, kejahatan terhadap perempuan, anak, dan perdagangan orang tidak hanya ditangani setelah terjadi, tetapi juga dicegah sejak dini melalui kesadaran dan perlindungan bersama. (*)

Tingkatkan Profesionalisme Penyidik, Bidkum Polda Sultra Gelar Tes Uji Objektif KUHP dan KUHP di Polres Baubau



Kegiatan ini dibuka langsung oleh Wakapolres Baubau, Kompol Andi Usri, S.H., M.H., didampingi oleh Ketua Tim Bidkum Polda Sultra, Iptu Misdayana L., S.H., serta Kasikum Polres Baubau, AKP Subagiyo, S.H. Acara tersebut dihadiri oleh para Pejabat Utama (PJU), para Kapolsek jajaran, serta personel penyidik dan penyidik pembantu dari berbagai satuan fungsi.

“Dalam sambutannya, Wakapolres Baubau menekankan bahwa pemahaman mendalam terhadap regulasi hukum merupakan fondasi utama bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugas penyidikan yang akuntabel. “Uji objektif ini

bukan sekadar rutinitas, melainkan sarana evaluasi sejauh mana personel kita memahami aturan hukum yang berlaku. Profesionalisme Polri dipertaruhkan dalam setiap proses penyidikan. Oleh karena itu, saya instruksikan seluruh penyidik untuk mengikuti kegiatan ini dengan serius guna meminimalisir kesalahan prosedur yang dapat berujung pada praperadilan,” tegas Kompol Andi Usri, S.H., M.H.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman penyidik terhadap ketentuan KUHP dan KUHP terbaru. Selain itu, tes ini menjadi instrumen pengawasan dan pembinaan dari Bidkum Polda

Sultra untuk memastikan kualitas penanganan perkara pidana di wilayah hukum Polres Baubau tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Pelaksanaan tes berlangsung dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Melalui penguatan literasi hukum ini, diharapkan seluruh personel penyidik Polres Baubau dapat bekerja lebih presisi, transparan, dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum dalam memberikan keadilan bagi masyarakat.

Acara yang dimulai pukul 13.00 WITA tersebut berakhir pada pukul 15.30 WITA dengan situasi yang aman, tertib, dan lancar. (*)

Gubernur Sultra ASR: Persiapan Umat Masa Depan Harus Visioner dan Adaptif

gan penekanan pada otonomi dan pilihan personal. Karena itu, agama perlu hadir sebagai sumber inspirasi yang mampu menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada jajaran Kementerian Agama atas kontribusinya dalam pembangunan daerah, terutama di bidang pendidikan dan keagamaan di Sulawesi Tenggara.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Kementerian Agama yang telah bekerja keras dan



berkontribusi dalam pembangunan daerah,” ucapnya.

Gubernur berharap sinergi antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama terus diperkuat untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang maju, aman, sejahtera, dan religius.

Sejalan dengan itu, Menteri Agama Republik Indonesia, Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA, yang turut had-

ir dalam rakerwil ini menekankan bahwa mempersiapkan umat masa depan merupakan pekerjaan besar yang dihadapkan pada tantangan global, mulai dari aspek teologi, politik, hingga budaya.

Penguatan nasionalisme menjadi keharusan. Kekuatan Indonesia terletak pada umat Islam sebagai mayoritas yang mampu menjadi penjaga persatuan, pen-

yangga stabilitas, dan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegas Menteri Agama.

Baik Gubernur maupun Menteri Agama sepakat bahwa pembangunan umat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi masa depan menjadi kunci dalam menjaga harmoni sosial serta memperkuat fondasi kebangsaan Indonesia. (*)

Batal Mundur, Sara Ponakan Prabowo Kembali Pimpin Rapat DPR



Politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara memimpin rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya membahas evaluasi program kerja 2025 dan rencana kerja 2026, Kamis (22/1).

Laporan: Hamid

JAKARTA- Politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo atau Sara memimpin rapat kerja Komisi VII dengan Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Rifki Harsya membahas evaluasi program kerja 2025 dan rencana kerja 2026, Kamis (22/1). Sara sempat menyatakan mundur dari kursi anggota DPR setelah ramai demonstrasi pada akhir Agustus 2025. Namun,

pengunduran dirinya ditolak partai dan DPR.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu lantas memutuskan untuk mengambil jeda dua bulan terakhir ini.

Ditemui usai rapat, Sara mengaku keputusannya untuk kembali aktif di DPR tak lepas dari dukungan 10 ribu lebih konstituennya di Jakarta Barat, Utara, dan Kepulauan Seribu.

Sara mengaku memiliki tanggung jawab bagi konstituennya. Sehingga, dia

mengaku harus menjalankan tugas dan amanat dari mereka.

"Kecuali kalau misalkan nanti dari pihak kembali lagi konstituen meminta untuk saya berhenti, ya tentunya saya harus minimal mencoba lah untuk bisa membuat mereka bangga dan melakukan tugas saya dengan baik," ujar Sara.

Di sisi lain, Sara mengaku tetap harus menghormati putusan MKD yang menolak pengunduran dirinya. Apalagi putusan itu

didasarkan pada petisi 10 ribu konstituennya agar dia tetap menjadi anggota DPR.

"Saya menghormati dan bersyukur dan mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat, terutama konstituen saya di dapil, terutama mereka 10.000 lebih yang telah menandatangani petisi yang menaruh harapan dan juga kepercayaan kepada diri saya untuk tetap mewakili suara mereka di sini," ujarnya. (*)

Jadi Ketum Partai, Jubir Anies di Pilpres Mundur Komisaris PT Jakpro

Laporan: Alwan

JAKARTA-Juru bicara Anies Baswedan saat Pilpres 2024, Sahrin Hamid mundur dari jabatannya sebagai Komisaris PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Ia telah menyerahkan surat pengunduran diri ke Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada Rabu (21/1).

Pengunduran diri seiring dengan ditetapkannya Sahrin sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031 dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I yang diselenggarakan pada 18 Januari lalu.

"Bahwa pada tanggal 18 Januari 2026 di Jakarta, di



Eks Gubernur Jakarta Anies Baswedan menghadiri acara deklarasi organisasi masyarakat bernama Gerakan Rakyat yang dipimpin oleh juru bicaranya Sahrin Hamid, sebagai tokoh inspirasi.

dalam Rapat Kerja Nasional I 2026 Gerakan Rakyat. Kami ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat periode 2026-2031, dan diberi mandat untuk menyusun kepengurusan partai di semua tingkatan," kata Sahrin dalam keterangan tertu-

lis, Kamis (22/1).

Sahrin mengatakan langkah mundur itu merupakan bentuk ketaatan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2018 tentang Tata Kelola

BUMD.

Dalam aturan itu, kata dia, dijelaskan bahwa pejabat Komisaris BUMD tidak diperbolehkan berasal dari pengurus partai politik.

"Persyaratan untuk menjabat Komisaris tidak diperbolehkan berasal dari Partai Politik," katanya

Petugas Haji 2026 Kini Pakai Seragam Baru



Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf memamerkan seragam baru yang akan digunakan oleh petugas haji saat bertugas dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini.

Laporan: Alwan

J A K A R - TA-Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf memamerkan seragam baru yang akan digunakan oleh petugas haji saat bertugas dalam penyelenggaraan ibadah Haji pada tahun ini.

Momen itu terjadi saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI pada hari ini, Rabu (21/1). Sebelum memulai paparan, Irfan memamerkan seragam yang dikenakan oleh rombongan-

nya. "Pimpinan Komisi VIII dan para anggota, izinkan kami untuk memperkenalkan salah satu seragam Petugas Haji Republik Indonesia yang akan dikenakan nanti ketika bertugas di Makkah dan Madinah yang kita pakai sekarang

ini," kata Irfan.

Ia mengatakan seragam itu sebelumnya sempat disosialisasikan oleh Wakil Menteri Dahni Anzar dua pekan lalu.

Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf memamerkan seragam baru yang akan digunakan oleh petugas haji saat bertugas dalam penyelenggaraan ibadah Haji tahun ini. ANTARA FOTO/ASPRIL-LADWIADHA

"Sebetulnya sudah sejak dua minggu lalu disosialisasikan oleh Pak Wamen kita yang beliau kenakan ketika menggunakan kendaraan dinas di KRL itu," kata Irfan.

Ia pun meminta pejabat-pejabat kementeriannya untuk berdiri agar seragam itu didokumentasikan

oleh wartawan yang meliput.

Sementara dalam paparannya, Irfan menjelaskan progres istitha'ah jemaah haji. Irfan mengatakan jumlah jemaah yang diperiksa ada 220.283, sementara jemaah haji khususnya ada 14.644.

"Yang istitha'ah untuk reguler ada 216.237, sementara jemaah haji khusus yang istitha'ah 13.485. Di haji reguler yang tidak istitha'ah ada 1.135, jemaah haji khusus 34. Ini juga kadang-kadang kami mendapatkan beberapa komen bahwa Kementerian Haji ini tidak memberi peluang untuk orang menjalankan ibadah haji, padahal kita ingin istitha'ahnya benar-benar diterapkan," kata Irfan. (*)

ia menjelaskan mandat yang diterima untuk memimpin partai mengharuskannya untuk segera fokus pada penyusunan kepengurusan partai di seluruh tingkatan.

"Untuk menjaga integritas terhadap kepatuhan ketentuan hukum tersebut di atas. Maka, dengan ini saya menyatakan mengundurkan diri dari posisi sebagai Komisaris PT Jakarta Prop-

ertindo," kata Sahrin.

Lebih lanjut, Sahrin mengatakan pengunduran diri itu juga merupakan wujud komitmen terhadap nilai Panca Dharma Gerakan Rakyat, khususnya integritas moral yakni kejujuran dalam bersikap, keberanian mengambil keputusan yang benar, serta konsistensi antara nilai dan tindakan.

"Saya ingin menyampaikan

ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk tugas sebagai Komisaris PT. Jakarta Propertindo (Perseroda) sejak bulan Agustus 2025. Sehingga saya menjalankan amanat tersebut dengan kinerja, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai komisaris," ujarnya. (*)

Pemprov Sultra Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Ir Muhammad Asnan La Amba Bin La Amba Mantan Ketua Dewan Pengawas RSUD Bahteramas



Laporan: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan ucapan bela sungkawa yang mendalam atas wafatnya Ir. Muhammad Asnan La Amba Bin La Amba, yang meninggal dunia di Kendari akibat serangan jantung.

Ucapan duka tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Drs. H. Asrun Lio, M.Hum., Ph.D, mewakili Gubernur Sulawesi Tenggara,

Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, beserta seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (21/1/2026).

“Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bapak Gubernur, kami menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya almarhum Ir. Muhammad Asnan La Amba Bin La Amba. Semoga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, diampuni segala dosa-dosanya, dan keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan

serta ketabahan,” ujar Sekda Sultra.

Semasa hidupnya, almarhum dikenal sebagai sosok yang berdedikasi dan memiliki kontribusi dalam pembangunan daerah. Almarhum pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas RSUD Bahteramas pada masa kepemimpinan Gubernur H Ali Mazi SH.

Menurut Sekda Sultra, almarhum merupakan pribadi yang baik, rendah hati, dan memiliki pergaulan luas serta gemar menjaga silaturahmi.

“Almarhum dikenal sebagai orang yang sangat menjaga silaturahmi, memiliki banyak sahabat, serta menjalin hubungan sosial yang baik dengan berbagai kalangan,” tambahnya.

Almarhum dimakamkan di TPU Punggolaka, Kota Kendari, pada Rabu, 21 Januari 2026, setelah salat Magrib.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menyampaikan penghormatan dan apresiasi setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa almarhum. (*)

tidak anti teknologi. Penguasaan teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan coding merupakan keharusan jika Indonesia ingin maju. Namun, penguasaan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan keadaban digital (digital civility) agar teknologi benar-benar membawa kemaslahatan.

Dalam konteks kurikulum, Kementerian Pendidikan telah memasukkan mata pelajaran pilihan coding dan AI, sejalan dengan hasil survei World Economic Forum yang menempatkan analytical thinking, AI, dan coding sebagai keterampilan paling dibutuhkan di masa depan, selain critical thinking, creativity, communication, dan collaboration. Namun, Menteri menekankan bahwa pembelajaran teknologi harus disertai penguatan karakter, tanggung jawab, dan etika.

Menteri Abdul Muati juga mengulas konsep deep learning yang tidak hanya menekankan kemampuan berpikir tingkat tinggi (higher order thinking), tetapi juga deep reading dan deep thinking. Ia menjelaskan perbedaan antara tafakur (berpikir dengan akal) dan tadabbur (perenungan dengan hati), seraya menegaskan bahwa pendidikan sejatinya

bekerja melalui hati yang gembira dan terbuka.

Menurutnya, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan membahagiakan menjadi kunci agar peserta didik benar-benar dapat menyerap ilmu. Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan akan meluncurkan kebijakan pembudayaan sekolah yang aman dan nyaman, agar sekolah menjadi “rumah kedua” bagi peserta didik, tempat mereka belajar dengan sukacita dan tujuan hidup yang jelas.

Sementara itu, dalam sambutannya, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Ir. Hugua menyampaikan terima kasih atas kehormatan Menteri Pendidikan RI di Sulawesi Tenggara. Ia menyebut kunjungan tersebut sebagai sebuah kehormatan dan bentuk kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah.

Wagub Hugua menilai tema deep learning sangat relevan dan menarik, terutama jika dikaitkan dengan pendekatan pendidikan yang lebih holistik. Ia mengaitkan konsep deep learning dengan Teori U yang dikembangkan oleh Otto Schärmer dan Peter Senge dari MIT, yang menekankan koneksi mendalam antara manusia dengan dirinya sendiri, sesama, Tuhan, dan

Wakil Gubernur Sultra Hadiri Silatnas DPP GUPPI & Ummusshabri International Expo “Congress 2026

Laporan: Lisna

KENDARI, BP-Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, menghadiri kegiatan Silaturahmi Nasional (Silatnas) DPP GUPPI yang dirangkaikan dengan Ummusshabri International Expo & International Congress 2026 dengan tema United The World By Giving Insight Through Education in Digital Era. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Plaza Inn Kendari, Sabtu (10/01/2025).

Kegiatan berskala nasional dan internasional ini turut dihadiri oleh Prof. Dr. Abdul Muati, Ketua

Umum DPP GUPPI Prof. dr. Faisal Jalal, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, para kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, para rektor perguruan tinggi di Kendari, serta delegasi internasional dari Turki, Filipina, Malaysia, Tiongkok, dan Australia.

Dalam sambutannya, Menteri Pendidikan RI Prof. Dr. Abdul Muati menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pendidikan yang telah dilakukan oleh Ummusshabri. Ia bahkan menyampaikan bahwa apa-

bila seluruh sekolah di Indonesia memiliki kualitas seperti Ummusshabri, maka tugas Menteri Pendidikan akan jauh lebih ringan.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini masih terdapat tiga persoalan besar dalam dunia pendidikan Indonesia yang harus segera diselesaikan. Persoalan pertama adalah akses dan mutu pendidikan. Meskipun konstitusi melalui Pasal 31 UUD 1945 dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjamin hak setiap warga negara untuk mem-

peroleh pendidikan yang bermutu, kenyataannya masih terdapat anak-anak Indonesia yang belajar di satuan pendidikan dengan fasilitas dan kualitas yang sangat terbatas, bahkan sebagian belum mendapatkan hak pendidikannya karena faktor ekonomi, geografis, kondisi fisik, maupun keamanan.

Untuk itu, Kementerian Pendidikan mengusung visi “Pendidikan Bermutu untuk Semua” sebagai wujud pelaksanaan amanat konstitusi sekaligus komitmen menjalankan Asta



alam semesta.

Menurutnya, esensi pendidikan masa depan adalah membantu peserta didik memahami jati dirinya, memberi makna bagi orang lain, serta berkontribusi terhadap ekosistem dan lingkungan. Jika sistem pendidikan Indonesia mampu bergerak ke arah terse-

but, maka pendidikan tidak hanya mencetak individu cerdas, tetapi juga manusia yang berakarakter, berempati, dan bertanggung jawab.

Atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Wakil Gubernur menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Menteri Pendidikan RI, Ketua

Umum DPP GUPPI, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Silatnas dan International Congress ini. Ia berharap kegiatan ini dapat melahirkan gagasan-gagasan strategis untuk mendorong kemajuan pendidikan Indonesia, khususnya di era digital. (*)

Peresmian Kantor TP-PKK Buton Tengah Dirangkaikan Rapat Internal dan Yasinan Bersama



Pewarta: Kamarudin

Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP, M.Si bersama Wakil Bupati Muh. Adam Basan, menghadiri peresmian Kantor Tim Penggerak PKK (TP-PKK) Kabupaten Buton Tengah, Jumat (9/1/2026). Kegiatan ini turut dihadiri Ketua TP-PKK Buton Tengah Umi Noranah Azhari, S.Pd, staf ahli TP-PKK Kartini Adam Basan, para Kepala OPD serta jajaran pengurus TP-PKK. Peresmian kantor tersebut dirangkaikan dengan rapat internal TP-PKK dan kegiatan yasinan bersama, sebagai bentuk rasa syukur sekaligus penguatan kebersamaan antar pengurus.

Dalam sambutan-

nya, Ketua TP-PKK Buton Tengah, Umi Noranah Azhari, S.Pd, menyampaikan rasa syukur atas hadirnya kantor TP-PKK yang representatif. “Alhamdulillah, kita sudah memiliki ruang sendiri yang bagus dan nyaman. Jika masih terasa panas, insyaallah AC akan segera dipasang. Ke depan, seluruh program yang telah terencana akan tetap berjalan seperti tahun-tahun sebelumnya. Kami juga berkomitmen meminimalisir pengeluaran dan lebih memprioritaskan manfaat program untuk masyarakat,” ujarnya. Ia juga berharap adanya arahan dari Bupati Buton Tengah terkait pengembangan program baru, terma-

suk pemanfaatan lahan kantor untuk tanaman keluarga. “Kami berharap Pokja III dapat mengedukasi masyarakat agar menanam tanaman keluarga di lingkungan masing-masing,” tambahnya. Sementara itu, Bupati Buton Tengah Dr. Azhari, S.STP, M.Si dalam arahannya menegaskan bahwa PKK merupakan ujung tombak pembinaan keluarga. Menurutnya, keberadaan PKK sangat strategis dalam mewujudkan keluarga yang rukun, sehat, bersih, aman, dan sejahtera. “PKK memiliki peran besar dalam membangun ketahanan keluarga. Nilai-nilai yang diajarkan, baik dari sisi kebersihan, kesehatan, maupun keharmonisan rumah

tangga, harus terus dijaga dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkap Bupati. Bupati juga menekankan pentingnya peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat, dengan berpedoman pada nilai-nilai agama serta keteladanan para tokoh dan ulama, sehingga PKK dapat menjadi contoh positif di tengah masyarakat. Peresmian Kantor TP-PKK ini diharapkan menjadi momentum baru bagi TP-PKK Buton Tengah untuk semakin meningkatkan kinerja, memperkuat koordinasi, serta menghadirkan program-program yang berdampak langsung bagi kesejahteraan keluarga dan masyarakat. (*)

Kemenag Buton Tengah Gelar Upacara Hari Amal Bakti ke-80 Kementerian Agama RI

Pewarta: Kamarudin

BUTENG, BP-Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Buton Tengah menggelar Upacara Peringatan Hari Amal Bakti (HAB) ke-80 Kementerian Agama Republik Indonesia di halaman Kantor Kemenag Buton Tengah, Sabtu (3/1/2026). Upacara berlangsung khidmat, Bupati Buton Tengah, Dr. Azhari, S.STP, M.Si, bertindak sebagai Inspektur Upacara. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati, Muh. Adam Basan, S.Sos, Kepala Kemenag Buton Tengah, Abdul Rahman Jaya, Pj Sekretaris Daerah, Armin, S.Pd, M.Si, pejabat struktural dan fungsional Kemenag Buton Tengah, serta para tamu undangan. Dalam amanatnya, Bupati Buton Tengah

membacakan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia pada peringatan HAB ke-80 yang mengusung tema “Umat Rukun dan Sinergi, Indonesia Damai dan Maju.” Tema tersebut menegaskan bahwa kerukunan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sinergi kebangsaan yang produktif, di mana perbedaan identitas, keyakinan, dan latar belakang sosial menjadi kekuatan kolaboratif untuk mendorong kemajuan bangsa. Disampaikan pula bahwa kehadiran Kementerian Agama merupakan kebutuhan nyata bangsa Indonesia yang majemuk. Republik Indonesia tidak dibangun oleh satu golongan, melainkan melalui sinergi seluruh komponen bangsa sejak masa perjuangan

kemerdekaan hingga saat ini. Para pendiri Kementerian Agama meletakkan cita-cita besar agar lembaga ini berperan aktif dalam membina kehidupan keagamaan yang damai, adil, rukun, dan sejahtera. Memasuki usia delapan dekade, Kementerian Agama ditegaskan tetap konsisten sebagai penjaga nalar agama dalam bingkai kebangsaan. Peran tersebut terus diperkuat melalui peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan, penguatan kerukunan umat beragama berbasis kemanusiaan, pemberdayaan ekonomi umat, serta menghadirkan nilai-nilai agama sebagai solusi atas berbagai persoalan bangsa. Sepanjang tahun 2025, Kementerian Agama telah memba-

ngun fondasi “Kemendag Berdampak” melalui transformasi digital layanan keagamaan yang semakin cepat, transparan, dan mudah diakses masyarakat. Selain itu, penguatan ekonomi sosial keagamaan seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, dan dana kebajikan terus didorong sebagai penggerak kemandirian lembaga keagamaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sektor pendidikan, kualitas madrasah, sekolah keagamaan, dan perguruan tinggi keagamaan terus menunjukkan peningkatan dan mampu bersaing sejajar dengan institusi pendidikan lainnya. Dalam merespons tantangan zaman, khususnya perkembangan Artificial Intelligence (AI) di era VUCA (Volatility, Un-

DPRD Butur Dukung Program BPSP



Laporan: Kasrun

BUTUR, BP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Buton Utara (Butur) Sulawesi Tenggara (Sultra), terus mendukung pembenahan infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Di Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Butur mengalokasikan anggaran untuk program bedah rumah. Sebanyak 539 unit rumah di usulkan untuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BPSP) ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Tentunya sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Butur mendukung penuh langkah strategis pemerintah daerah dalam pengusulan program BPSP ke Kementerian PUPR.

Wakil Ketua DPRD Butur Sujono mengatakan, DPRD Butur tetap berkomitmen untuk mendukung hal tersebut demi kepentingan masyarakat. “Artinya semua itu kami memberikan semua dukungan namanya untuk kepentingan masyarakat, saya juga dari ketua Partai dan fraksi Golkar tentunya kita memberikan masukan supaya bisa di akomodir minimal di Butur ini tidak kosong,” ujar Sujono saat ditemui di kantornya beberapa pekan lalu. Tentunya, kebijakan BPSP ini merupakan bantuan Pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah guna untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dapan peningkatan kualitas rumah dan pembangunan baru rumah beserta prasarana sarana dan utilitas umum. “Dan setau saya memang tiap tahun ada terus dan dengan

jumlah seperti itu saya tidak bisa jamin, tapi inikan usulan Pemda, tapi saya yakin pasti ada,” ungkapnya. Sujono mengaku, di enam kecamatan di Kabupaten Butur ini masih banyak rumah yang tidak layak huni, untuk itu guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan berpihak pada kesejahteraan warga. “Di Buton Utara ini masih banyak rumah yang tidak layak huni wajib di benahi. Masih banyak dan itu yang diutamakan,” ujarnya. Terkait penentuan pemberian bantuan perumahan swadaya, Sujono menegaskan harus tepat sasaran dan benar-benar sangat membutuhkan. “Yang namanya Kepentingan masyarakat saya tetap mendukung saya tidak melihat warna, saya tetap mendukung,” tandasnya. (*)



certainty, Complexity, dan Ambiguity), Kementerian Agama diharapkan berperan aktif. ASN Kemenag dituntut mampu mengisi ruang digital dan perkembangan AI dengan konten keagamaan yang moderat, sejuk, otoritatif, dan mencerahkan, sehingga teknologi menjadi sarana pemersatu

umat, bukan pemicu disinformasi dan perpecahan. Menutup sambutan, Bupati Buton Tengah mengajak seluruh ASN Kementerian Agama untuk terus bertransformasi menjadi pribadi yang adaptif, responsif, berintegritas, dan profesional dalam melayani umat. Dengan

semangat kerukunan dan sinergi, Kementerian Agama diyakini mampu berkontribusi mengantarkan Indonesia menuju masa depan yang damai, maju, dan bermartabat. Usai Upacara, kegiatan dilanjutkan dengan acara ramah tamah yang berlangsung di Aula kantor Kementerian Agama Buton Tengah. (*)

Perluas Akses Putra-Putri Daerah, Kemenkes Buka Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit



Peliput: Lisna

J A K A R T A , BP-Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pembukaan jalur pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit merupakan kebijakan afirmatif untuk memperluas akses putra-putri daerah terhadap pendidikan spesialis, sekaligus mendorong pemerataan layanan kesehatan nasional.

Melalui penetapan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama, pemerintah menargetkan peningkatan signifikan jumlah dokter spesialis yang berasal dan kembali mengabdikan ke daerah.

Kebijakan ini menjadi bagian dari transformasi sistem pendidikan kedokteran guna meningkatkan jumlah lulusan dokter spesialis dari sekitar 2.700 menjadi 10.000 orang per tahun.

Menurutnya, peningkatan tersebut diperlukan untuk mengejar keteringgalan Indonesia dibandingkan negara maju dalam rasio dokter spesialis terhadap jumlah penduduk.

“Kalau kita produksi 2.700 dengan populasi 280 juta, kemudian Inggris produksi 12.000, pasti ada yang salah. Harusnya kita naikan minimal 4 kali lipat,” ujar Budi.

Penetapan rumah sakit sebagai penye-

leenggara utama pendidikan membuka akses lebih luas bagi dokter umum untuk melanjutkan pendidikan spesialis, sekaligus mengatasi keterbatasan kuota universitas dalam Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Melalui model pendidikan berbasis rumah sakit (hospital-based), jalur pendidikan spesialis diharapkan lebih merata dan mudah diakses oleh dokter di seluruh Indonesia.

Program ini memprioritaskan putra-putri daerah, khususnya dokter umum yang telah mengabdikan di RSUD, agar setelah lulus dapat kembali memperkuat layanan kesehatan di daerah asal. Pemerintah juga

memastikan mutu pendidikan tetap terjaga melalui penerapan standar global, termasuk pengaturan jam kerja dan sistem evaluasi yang transparan.

“Kita bisa memastikan standarnya ada, standar kualitasnya itu tadi. Bukan hanya sekadar standar kelulusan,” tegas Menkes.

Direktur Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Rujukan, Ockti Palupi Rahayuningtyas, menambahkan bahwa kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk mengatasi ketimpangan distribusi tenaga medis secara sistemik melalui sinergi pemerintah dan rumah sakit. (*)

Menkes Ajak Masyarakat Tidak Takut Periksa Gejala Kusta

JAKARTA-, Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengajak masyarakat untuk tidak takut memeriksakan diri apabila mengalami gejala kusta. Ia menegaskan bahwa kusta bukan penyakit mistik atau kutukan, melainkan penyakit menular yang penyebabnya telah lama diketahui secara ilmiah dan dapat disembuhkan.

“Kusta bukan penyakit mistik atau kutukan. Ini penyakit yang disebabkan oleh bakteri, dan ilmu pengetahuannya sudah jelas sejak lebih dari satu abad lalu,” ujar Menkes Budi dalam media briefing terkait kondisi kusta di Indonesia, Kamis (15/1), di Perpustakaan Wisma Habibie Ainun, Jakarta.

Kusta disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Terjadinya kusta merupakan hasil interaksi berbagai faktor, yaitu pejamu (host), kuman (agent), dan lingkungan. Penularan terjadi melalui kontak yang erat dan berkepanjangan dengan seseorang yang terinfeksi kusta. Gejala kusta dapat ditandai dengan mun-

culnya bercak kulit merah atau putih yang tidak gatal, tampak mengkilap atau kering bersisik, kulit yang tidak berkeriat, rontoknya alis mata, penipisan pada wajah dan telinga, serta lepuh atau luka tidak nyeri pada tangan atau kaki. Gangguan pada saraf juga dapat terjadi, seperti nyeri pada saraf tepi, kesemutan, rasa tertusuk atau nyeri pada anggota gerak, kelemahan otot atau kelopak mata, disabilitas atau deformitas tanpa riwayat kecelakaan, serta ulkus yang sulit sembuh.

Menkes Budi menjelaskan bahwa pengobatan kusta telah tersedia dan terbukti efektif. Ia menekankan bahwa setelah pengobatan dimulai, risiko penularan dapat dihentikan dalam waktu singkat.

“Begitu pengobatan dimulai, dalam waktu kurang dari satu minggu pasien sudah tidak menularkan lagi,” jelasnya.

Namun demikian, stigma dan disinformasi masih menjadi tantangan dalam upaya penanganan kusta. Kondisi ini menye-

babkan sebagian masyarakat enggan memeriksakan diri sehingga penemuan kasus sering kali terlambat.

Senada dengan Menkes Budi, peneliti The Habibie Center, Ansori, menilai bahwa penanganan kusta tidak dapat dilihat hanya dari sisi medis. Faktor sosial, menurutnya, memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pengendalian penyakit ini.

“Banyak orang yang sebenarnya sudah mengetahui dirinya terkena kusta, tetapi memilih menyembunyikannya karena takut terhadap konsekuensi sosial,” ujar Ansori.

Ia menambahkan bahwa stigma dan diskriminasi membuat penderita enggan berobat, sehingga berdampak pada keterlambatan deteksi dan proses penyembuhan.

Sementara itu, WHO Goodwill Ambassador for Leprosy Elimination, Yohei Sasakawa, menyebut Indonesia memiliki peran penting dalam upaya penanganan kusta secara global.

Eliminasi kusta tidak hanya tentang pen-

ada 35 rumah sakit di sekitar 30 provinsi, dan RS Soeradji resmi menjadi yang ke-36,” ujar Prof. Dante.

Ia menekankan pentingnya konsistensi mutu dan empati dalam pelaksanaan layanan bedah jantung terbuka sebagai bagian dari marwah pelayanan rumah sakit.

Direktur Utama RS Soeradji Tirtonegoro, Sholahuddin Rhatomy, menyatakan bahwa dimulainya layanan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan RSST yang telah hampir satu abad mengabdikan bagi masyarakat.

“Hari ini kami menapaki babak baru dengan memulai pelayanan bedah jantung terbuka. Ini adalah salah satu layanan kesehatan lanjutan

berteknologi tinggi dan berisiko tinggi sebagai bentuk dedikasi kami,” ujarnya.

Layanan ini merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Kesehatan RI dalam pemerataan layanan jantung nasional, dengan RS dr. Kariadi Semarang sebagai rumah sakit pengampu regional yang mengawal kesiapan RSST.

Direktur Utama RS dr. Kariadi Semarang, Agus Akhmadi, menegaskan bahwa penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, sehingga penguatan jejaring layanan jantung menjadi prioritas nasional.

“Program jejaring layanan jantung yang diinisiasikan oleh ke-

menterian kesehatan memastikan layanan yang komprehensif tidak hanya berpusat di rumah sakit besar, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat di berbagai wilayah, termasuk di Klaten,” kata Agus.

Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyambut baik kehadiran layanan ini dan menilai RSST berpotensi mendukung pengembangan wisata medis di Kabupaten Klaten.

“Dengan layanan kesehatan yang semakin lengkap dan akses yang mudah, masyarakat tidak perlu lagi berobat jauh-jauh ke Jakarta atau Surabaya,” ujar Hamenang. (*)

RS Soeradji Tirtonegoro Klaten Resmi Memulai Layanan Bedah Jantung Terbuka 20 Jan 2026

RUMAH Sakit Soeradji Tirtonegoro (RSST) Klaten resmi memulai layanan bedah jantung terbuka sebagai bagian dari upaya peningkatan akses layanan kesehatan lanjutan berteknolo-

gi tinggi bagi masyarakat, khususnya di Jawa Tengah dan sekitarnya.

Wakil Menteri Kesehatan Prof. Dante Saksono Harbuwono menyampaikan bahwa pembiayaan kesehatan untuk pen-

yakit jantung di Indonesia telah mencapai Rp19,7 triliun. Hal ini menunjukkan besarnya beban penyakit jantung sekaligus menegaskan urgensi penguatan layanan bedah jantung terbuka, baik

untuk kasus kelainan jantung bawaan pada anak maupun penyakit jantung dewasa.

“Tahun 2012, hanya ada 10 rumah sakit yang bisa melakukan bedah jantung terbuka di Indonesia. Sekarang

<div><div>PT FAREN GRAFIKA</div><div><div><div></div><div>Harian Pagi</div><div>Baubau Post</div></div></div><div>KRITIK, LUGAS, DAN INDEPENDEN</div><div>Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun dalam melakukan tugas jurnalistik</div><div>Dalam Pelaksanaan Tugas, Wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu, masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post</div><div>Segala berita yang diterbitkan oleh Baubau Post meruoakan tanggung jawab penanggungjawab redaksi</div></div>	<div>Pemimpin Umum: Fauzan NWA Penanggungjawab/Pemimpin Redaksi: Ardi Redpel: Amat Jr Korlip: Noval Redaktur: Kasrun,Rahim Reporter: Mashuri, Lisna, Asis, Hafid, Firman</div>	<div>Layouter: Ririn Pracetak: Aditya Cetak Jamaludin</div>	<div>Penerbit: PT FAREN GRAFIKA Komisaris: Erna Agule Direktur Utama: Andina Latief Manager Keuangan: Nabila DAA Manager Iklan & Pemasaran: Jamaluddin Kepala Sirkulasi: Robi Administrasi: Salvana</div>	<div>Kepala Biro Wakatobi: Risman Kepala Biro Buton Utara: Kasrun Kepala Biro Buton: Rahim Kepala Biro Buton Selatan: Firman Kepala Biro Buton Tengah: Komarudin Kepala Biro Sultra: Masuri</div>
				<div>Agen Baubau: Jamaluddin Agen Buton Selatan: Firman Agen Buton: Samrihan Agen Buton Utara: Kasrun</div> <div>Harga dan Langganan: Dalam Kota Baubau 100.000/bulan, Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim Eceran dalam Kota Baubau Rp 5000/eks</div>

Perkuat Mental Spiritual, Polres Baubau Peringati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 H



Laporan: Firman

BAUBAU, BP. Di tengah kesibukan mengawal keamanan wilayah dan keberhasilan Polri dalam mengungkap berbagai kasus internasional di awal tahun 2026, Polres Baubau menggelar peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1447 H/2026 M. Acara yang berlangsung khidmat di Masjid Al-Iman Polres Baubau ini mengusung tema "Memperkuat Keimanan dan Ketakwaan Personel Polri Untuk Masyarakat Dalam Aksi Kemanusiaan Dan Kepedulian Sosial".

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kapolres Baubau AKBP Mayestika Hidayat, S.I.K., M.H., Wakapolres Kopol Andi Usri, S.H., M.H., jajaran pejabat utama (PJU), Ustad Majid Nene, S.Ag., M.Pdi., Pengurus Bhayangkari Cabang Polres Baubau, pengurus masjid Al-Iman, serta personel Polres Baubau. Peringatan ini menjadi momen

tum refleksi diri bagi seluruh anggota kepolisian untuk meningkatkan kualitas ibadah dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Aipda Muh. Furqan, yang membawakan suasana religius mendalam bagi seluruh hadirin dan pembacaan saritilawah Qur'an oleh Brigpol Nadila Bin Hamid, SH.

Dalam sambutannya, Kapolres Baubau menekankan pentingnya meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW, terutama dalam menjalankan tugas kepolisian yang penuh tantangan.

"Peringatan Isra Mi'raj ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bagi kita semua untuk senantiasa menjaga integritas dan moralitas. Sejalan dengan tema hari ini, saya berharap setiap personel mampu mengimplementasikan nilai-nilai spiritual dalam aksi nyata ke-

manusiaan. Keimanan yang teguh harus menjadi landasan kita dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan yang tulus kepada masyarakat Baubau.

Sementara itu, tausiah agama disampaikan oleh Ustadz Majid Nene, S.Ag., M.Pdi. Dalam ceramahnya, ia menjelaskan bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan pendekatan ilahiyah yang tidak dapat dijangkau oleh ilmu pengetahuan saintifik. Menurutnya, perjalanan Nabi Muhammad SAW hingga ke langit ketujuh dalam satu malam merupakan mukjizat yang melampaui batas akal manusia pada masanya.

Ustadz Majid Nene juga menegaskan bahwa dalam peristiwa Isra Mi'raj inilah Nabi Muhammad SAW menerima perintah langsung dari Allah SWT untuk menunaikan shalat lima waktu, yang men-

jadi kewajiban utama dan fondasi keimanan umat Islam hingga saat ini. Untuk itu mengingatkan para personel polres Baubau dan kita semua agar tidak meninggalkan ibadah shalat di tengah kesibukan bertugas, karena shalat merupakan kewajiban utama umat Islam sesuai syafaat Nabi Muhammad SAW.

Peringatan ini ditutup dengan doa bersama yang dipimpin langsung oleh Ustad Majid Nene. Melalui kegiatan ini, Polres Baubau menegaskan komitmennya untuk terus berbenah diri menjadi institusi yang tidak hanya tangguh secara hukum, tetapi juga memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Dan berharap seluruh personel semakin meningkatkan kualitas ibadah, memperkokoh nilai spiritual, serta menjadikan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dalam kehidupan bermasyarakat. (*)

pleks.

Yusril menegaskan penyusunan RUU tersebut tidak bermaksud untuk membatasi kebebasan berekspresi atau bersifat antidemokrasi di Indonesia.

Pemerintah, kata dia, lebih menitikberatkan pada penguatan kelembagaan dan pengaturan mekanisme kontra-propaganda, termasuk peningkatan kesadaran publik agar masyarakat mampu mengenali dan menyaring informasi yang menyesatkan.

"Ini bukan soal pelarangan secara membabi buta, melainkan bagaimana negara memiliki instrumen untuk melindungi kepentingan nasional dari propaganda dan agitasi asing, sekaligus memperkuat literasi serta kepercayaan diri bangsa," imbuhnya melalui siaran pers, Rabu (21/1).

Yusril melanjutkan pemerintah saat ini masih berada pada tahap pengkajian dan penyusunan naskah akademik. Proses tersebut dilakukan secara terbuka dan memberi ruang partisipasi publik agar substansi kebijakan yang dirumuskan benar-benar menjawab kebutuhan dan tantangan nyata.

"Semua pihak tentu dipersilakan memberikan masukan. Namun, yang terpenting adalah memahami terlebih dahulu esensi persoalan ini secara utuh, bukan menolaknya secara apriori," kata pria yang memiliki rekam jejak malang melintang di pemerintahan sejak era Orde Baru (Orba) tersebut.

Menurut Yusril, disinformasi dan propaganda tidak hanya dilakukan oleh institusi resmi negara asing, tetapi juga dapat dijalankan oleh pihak swasta maupun kanal media sosial yang berbasis di luar negeri.

Dia mengatakan informasi yang menyesatkan tersebut kerap menyasar kepentingan nasional Indonesia, mulai dari sektor ekonomi hingga kohesi sosial tanpa adanya payung hukum yang memadai untuk menanganinya secara komprehensif.

"Selama ini kita menghadapi berbagai propaganda yang merugikan, misalnya terhadap produk unggulan nasional seperti kelapa sawit, minyak kelapa, hingga hasil perikanan. Narasi yang dibangun seolah-olah

produk kita berbahaya atau tidak sehat, padahal tujuan utamanya adalah melemahkan daya saing Indonesia demi kepentingan ekonomi pihak lain," ujar sosok yang sebelumnya dikenal pula sebagai pakar hukum tata negara itu.

Dia mengatakan propaganda juga dapat diarahkan untuk merusak mental bangsa, menurunkan rasa percaya diri nasional, bahkan memicu konflik sosial dengan mengadu domba kelompok masyarakat.

Dalam sejarah global, tuturnya, propaganda terbukti menjadi instrumen efektif untuk melemahkan suatu negara sebelum intervensi yang lebih besar dilakukan.

Rencana pemerintah membuat payung hukum Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing mendapat kritik masyarakat sipil.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)--salah satu organisasi sipil yang kerap bersuara soal integritas hukum dan HAM--menilai hal itu merupakan bagian utuh dari karakter kekuasaan yang semakin antikritik dan alergi terhadap suara rakyat, termasuk dari lembaga-lembaga masyarakat sipil.

Ketua YLBHI Muhammad Isnur menuturkan sejak lama pejabat-pejabat sangat tidak suka kritik yang datang dari masyarakat dan lembaga masyarakat sipil. Apalagi, Presiden Prabowo pernah menuduh ini sebagai bagian dari kepentingan asing.

"YLBHI melihat bahwa Prabowo menebarkan disinformasi dan menyudutkan orang/kelompok/ lembaga yang kritis terhadap pemerintah dengan menuduh ini adalah propaganda asing. Tuduhan usang yang selalu diulang padahal tidak mau mendengar suara rakyat. Tuduhan yang dilemparkan karena tak sanggup melawan kebenaran bahwa pemerintah inkompeten, arogan, dan anti pengetahuan," kata Isnur dikutip melalui siaran pers, 15 Januari 2026.

Isnur mengatakan RUU tersebut bertentangan dengan mandat konstitusi Pasal 28F UUD 1945 yang menerangkan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh infor-

masi untuk membangun pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Serta Pasal 28E UUD 1945 dan Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik sebagai perlindungan warga negara atas kebebasan berekspresi dan berpendapat.

"YLBHI memandang rencana ini benar-benar ditargetkan untuk menyasar rakyat yang kritis, mengontrol informasi, menutup pendanaan dan dukungan terhadap lembaga-lembaga masyarakat sipil yang selama ini berjuang untuk keadilan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, antikorupsi, kebebasan sipil, dan gerakan sosial lainnya," ungkap Isnur.

"Bahkan, draf ini juga bisa menyasar partai politik oposisi, kampus/akademisi, jurnalis/pers yang selama ini menjadi kelompok kritis," sambungnya.

Isnur juga menyinggung penyusunan RUU yang dilakukan secara tiba-tiba alias tanpa perencanaan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang sudah disepakati sebelumnya oleh DPR dan Pemerintah.

"Dalam dokumen Naskah Akademik yang YLBHI dapatkan, analisisnya juga sangat tidak klir dan penuh masalah. Ini semakin menunjukkan rencana busuk dan gelap dari Pemerintah," tegas Isnur.

Merespons kritik dari YLBHI itu, pada Kamis (15/1), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut penyusunan RUU Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing itu masih jadi sebatas wacana belaka.

"Belum, belum. Itu kan begini ya, kan semangatnya bagaimana kita itu--apa namanya--bukan kita tidak ingin keterbukaan, tidak," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta.

Walaupun demikian, menurut Prasetyo setiap informasi yang disampaikan lewat setiap platform atau sumber lainya harus dapat dipertanggungjawabkan. (*)

Yusril Akui Pemerintah Ingin Susun RUU Disinformasi & Propaganda Asing

Laporan: Amran

JAKARTA, BP-Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akhirnya mengakui rencana penyusunan naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Penanggulangan Disinformasi dan Propaganda Asing.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasaran (Menko Kumas Imipras) Yusril Ihza Mahendra



menyatakan wacana penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulan-

gan Disinformasi dan Propaganda Asing merupakan langkah strategis untuk mem-

perkuat ketahanan nasional Indonesia di tengah dinamika global yang semakin kom-

Wujudkan Generasi Emas, Bunda PAUD Baubau Luncurkan Gerakan “Jumpa Sigi”



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Bunda PAUD serta Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) Cabang Baubau menggelar kegiatan kolaboratif bertajuk "Menjaga Kesehatan Gigi dan Mulut Anak-Anak Kita, Generasi Emas Kota Baubau".

Acara yang dipusatkan di Aula Tut Wuri Handayani pada Kamis (22/01/2026) ini dirangkaikan dengan Pelatihan Kesehatan Gigi bagi guru PAUD serta peluncuran resmi inovasi kesehatan sekolah "Jumpa Sigi".

Bunda PAUD Kota Baubau, Hj. Aryati Yusran yang secara resmi juga meluncurkan gerakan "Jumpa Sigi" (Jumat PAUD Sikat Gigi) mengatakan, Gerakan ini dirancang sebagai upaya membangun karakter disiplin

dan kesadaran hidup sehat pada anak usia dini.

"Kita ingin menyikat gigi menjadi aktivitas yang menyenangkan, bukan beban bagi anak. Dengan kolaborasi antara guru hingga orang tua, kita memastikan senyum anak-anak Baubau akan sehat, cerah, dan penuh percaya diri," ujarnya.

Hj Aryati Yusran menyampaikan apresiasi khusus kepada PDGI yang merayakan hari ulang tahun ke-76. "Terima kasih telah menjadi mitra strategis dan garda terdepan dalam menjaga senyum sehat masyarakat Kota Baubau," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Baubau, Eko Prasetya, ST, MM, menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada PDGI Baubau yang terus konsisten mendukung program pendidikan sejak tahun 2025.

Pihaknya berharap program ini mampu mendongkrak kualitas pendidikan dan kesehatan anak di Kota Baubau. Selain itu, angka partisipasi PAUD meningkat pesat dari posisi 71% di tahun sebelumnya.

Eko Prasetya memberikan pesan untuk Kepala Sekolah untuk terus mendidik dengan hati karena di tangan anak-anak inilah masa depan bangsa dipertaruhkan. Kemudian, menekankan agar aktivitas sikat gigi tidak hanya dilakukan pada hari Jumat, tetapi menjadi rutinitas harian di rumah dan sekolah.

Sedangkan kepada para guru yang saat ini sedang menghadapi kendala status kepegawaian (PPPK/Honor Koordinator) dihimbau untuk tetap fokus mengabdikan dan kembali ke sekolah.

"Yuk kembali ke sekolah, kita mengajar kembali. Insya Allah, pemerintah dalam

waktu yang tidak lama akan mengeluarkan kebijakan khusus bagi bapak dan ibu guru kita," tegas Eko Prasetya.

Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting dan stakeholder pendidikan, di antaranya drg. Ikhrum Kharis, Sp.BMM., M. Ked. Klin (Ketua PDGI Cabang Kota Baubau) beserta jajaran anggota. Umi Kalsum, S.Pd (Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan Kota Baubau). Ketua dan Pengurus Pokja Bunda PAUD Kota Baubau. Para Guru PAUD se-Kota Baubau sebagai peserta pelatihan.

Acara diakhiri dengan sesi pelatihan teknis bagi guru PAUD agar mampu menjadi perpanjangan tangan dalam mengedukasi cara menyikat gigi yang benar kepada anak didik di sekolah masing-masing. (*)

Pemkot Baubau Gandeng Unidayan Sosialisasi Perda KTR di Kampus

Pewarta: Firman

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau melalui Dinas Kesehatan terus memperkuat implementasi Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Langkah ini diwujudkan melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2025 yang digelar di Kampus Universitas Dayanu Ikhsanuddin (Unidayan), Sabtu (17/01/2026).

Kegiatan ini menjadi momentum krusial mengingat tingginya angka perokok di kalangan generasi muda. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, kelompok usia 15-19 tahun merupakan perokok terbanyak (56,5%), sementara 18,4% perokok baru berusia 10-14 tahun.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau melalui Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Baubau, Yuslina, mengungkapkan bahwa edukasi di lingkungan pendidikan sangat mendesak. Merujuk pada prediksi WHO, jika tidak ada intervensi, 70% kematian akibat rokok pada tahun 2030 akan terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia.

"Perda Nomor 4 Tahun 2025 ini tidak bermaksud melarang konsumsi rokok secara total, melainkan mengatur dan menata agar hak masyarakat bukan perokok untuk menghirup udara bersih

tetap terpenuhi," ujar Yuslina.

Ditambahkan, sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 151 tentang kesehatan menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan dan mengimplementasikan kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dan Kota Baubau telah mengeluarkan Perda nomor 4 tahun 2025 tentang kawasan tanpa rokok yang meliputi fasilitas pelayanan masyarakat, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, sarana olahraga, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Hal ini bertujuan melindungi kesehatan masyarakat dan dampak buruk asap rokok dan menciptakan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok di Kota Baubau.

Ditempat yang sama, Wakil Rektor IV Unidayan, Dr. Syamsul Una, M.Pd, menyambut baik langkah Pemkot Baubau. Karena itu, sebagai bentuk komitmen nyata, Unidayan telah menerbitkan Peraturan Rektor tentang KTR di lingkungan kampus.

"Kami telah menindaklanjuti Perda ini dengan aturan internal dan membentuk Satgas Pengawas Imple-

mentasi KTR. Kami ingin menciptakan lingkungan belajar yang sehat bagi seluruh civitas akademika," tegas Dr. Syamsul Una.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber ahli, yakni Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kota Baubau, dr. Frederik Tangke Allo, Sp.B, yang memaparkan urgensi penerapan KTR dari aspek kesehatan, serta dr. Wa Ode Sarnings, Sp.PD, MARS, yang memberikan edukasi mengenai kaitan rokok dengan penyakit Diabetes Melitus.

Pada kesempatan tersebut, Dinas Kesehatan juga mensosialisasikan Program M A K E S A : Cek Kesehatan Gratis dengan menerjunkan dua tim medis dari UPTD Puskesmas Katobengke dan UPTD Puskesmas Sulaa. Seluruh dosen, mahasiswa, dan staf kampus diajak melakukan pemeriksaan kesehatan dini. Pihak Dinas Kesehatan juga mengingatkan bahwa layanan cek kesehatan ini tersedia secara gratis di seluruh Puskesmas se-Kota Baubau. Masyarakat dapat mendaftar melalui aplikasi Satu Sehat Mobile dan WhatsApp Chatbot Kemenkes: 0811-1050-0567 serta datang langsung ke Puskesmas terdekat. (*)

Tanda Tangani Prasasti Showroom Daihatsu MRM, Yusran Fahim Dorong Percepatan Ekonomi Daerah

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Wali Kota Baubau, H. Yusran Fahim, SE, secara resmi menandatangani prasasti peresmian Showroom Daihatsu Makassar Raya Motor (MRM) Baubau pada Selasa (20/1/2026). Kehadiran investasi baru ini diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi di Kota Baubau.

Dalam keterangan persnya, Wali Kota Baubau H Yusran

Fahim, SE menyampaikan apresiasi dan rasa bangganya atas ekspansi yang dilakukan oleh Daihatsu MRM di Kota Baubau. Menurutnya, berdirinya fasilitas ini merupakan bukti nyata bahwa iklim investasi di Baubau terus tumbuh positif.

"Kita senang sekali bisa berkunjung ke sini. Paling tidak, kita dapat melihat bahwa dengan tumbuh dan berkembangnya Daihatsu Makassar Raya Motor, berarti akan

meningkatkan perekonomian Kota Baubau," ujar H. Yusran Fahim.

Wali Kota Baubau juga mengakui keunikan perusahaan ini yang tidak hanya fokus pada sektor otomotif. Diketahui, grup perusahaan ini juga merambah ke sektor strategis lainnya seperti Ketenagalistrikan untuk mendukung kebutuhan energi daerah. Kemudian, sektor Kelautan seperti Budi daya lobster dan budi daya agar-agar (rum-

put laut).

"Harapan kita, mudah-mudahan ini bisa terus berkembang. Karena perusahaan ini bukan hanya konsen di bidang otomotif, ada juga kelistrikan hingga budidaya lobster dan agar-agar. Ini sangat luar biasa untuk membuka lapangan kerja," ungkapnya.

H Yusran Fahim berharap langkah ekspansi ini dapat memicu efek domino bagi kemajuan daerah, mulai dari penyerapan tenaga kerja lokal



hingga peningkatan daya beli masyarakat.

"Mudah-mudahan ini bisa berkembang, meningkatkan, dan memajukan perekonomian Kota Baubau ke depannya," tutup Wali Kota.

Sementara itu, acara

penandatanganan prasasti peresmian Daihatsu MRM Baubau ini turut dihadiri Wakil Wali Kota Baubau Ir Wa Ode Hamsinah Bolu, M.Sc, Kadis Kominfo Kota Baubau H Andi Hamzah Machmud, S.Sos,

M.Si, Kadis Perindag H La Ode Ali Hasan, SE, M.Si, Kadishub Arlis, S.Pd, M.Pd, yang mewakili Kadis DPMPSTSP Moh Husni Ganiru, SH, jajaran manajemen Daihatsu MRM Baubau. (*)